Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Nur Aripkah*, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, Reza Pramasta Gegana

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 1 Juli 2025 Direvisi : 13 Agustus 2025 Disetujui : 19 Agustus 2025	Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan dampak dalam pembaruan dan pembangunan hukum pidana di Indonesia yang selama ini masih menggunakan aturan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Terdapat pro dan kontra terkait beberapa pengaturan tindak pidana di tengah-tengah masyarakat dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini sebelum ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbandingan konsep hukum pidana yang termuat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini dengan konsep hukum pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dimuat terminologi yuridis tindak pidana dalam KUHP Nasional 2023. Konsep pertanggungjawaban pidana diatur secara tegas dengan syarat pertanggungjawaban pidana berupa unsur sengaja atau karena kealpaan serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023 memiliki suatu tujuan dan pedoman dalam pemidanaan.
Kata Kunci: Hukum Pidana; Konsep; Pembaharuan.	
*Penulis Korespondensi Tel. : +6285390220001 E-mail : nurariakah@fh.unmul.ac.id	

How to Cite:

Aripkah, N., K. Sanata, K. N. Asufie, dan R. P. Gegana, "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 209-226.

PENDAHULUAN

Sebelum disahkannya undang-undang ini, seperti diketahui bersama bahwa banyak pro dan kontra yang mewarnai pengesahan undang-undang tersebut. Pemikiran untuk mengganti KUHP warisan kolonial sebenarnya sudah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan. Hal demikian tercermin pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pemikiran demikian juga dikuatkan pada Seminar Hukum Nasional Tahun 1963 yang merekomendasikan keberadaan KUHP nasional harus diwujudkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berdasarkan hal demikian, maka pada tahun 1946 Departemen Kehakiman mengeluarkan konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang "Asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia" untuk menggantikan Buku I KUHP (Bagian Umum).¹

Pro dan kontra pun mewarnai pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini. Masih teringat di benak kita bersama pada tahun 2019 terjadi demonstrasi besar-besaran secara nasional untuk menolak hadirnya undang-undang ini. Hal ini dimulai dari pembahasan RUU KUHP dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mewakili pemerintah dan Komisi III DPR pada 15 September 2019. Pembahasan RUU KUHP itu dilakukan pada 14-15 September 2019. Menurut pernyataan Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang merupakan koalisi 40 lembaga swadaya masyarakat, pembahasan RUU KUHP itu dilakukan secara tidak terbuka dan sejumlah pasalnya dinilai bermasalah.²

Mereka menggaungkan misi tidak percaya kepada wakil rakyat yang dinilai telah mengabaikan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan sejumlah produk legislasi yang akan disahkan, termasuk halnya KUHP baru ini. Kalangan mahasiswa berargumen bahwa beberapa pasal yang termuat dalam RUU KUHP pada waktu itu dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi secara serampangan.

Sejumlah pasal RUU KUHP yang diprotes pada waktu itu, yakni pertama pasal soal korupsi yang memuat hukuman yang lebih rendah daripada UU Tipikor. Kemudian pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden yang mengancam pelaku dengan penjara maksimal 3,5 tahun. Lalu pasal tentang makar yang dapat diancam hukuman mati, seumur hidup atau penjara 20 tahun. Selanjutnya soal penghinaan bendera, pasal soal alat kontrasepsi, pasal aborsi, pasal pemidanaan gelandangan, dan pasal tentang zina dan kohabitasi (kumpul kebo). Kemudian pasal tindak pidana penghinaan agama dan pasal terkait pelanggaran HAM berat. Aksi itu tidak mendapat tanggapan dari DPR. Alhasil pada 23 September 2019, para mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar.

Selain dari sudut pandang kontra, maka banyak juga yang menilai bahwa hadirnya KUHP baru nantinya memberikan hal-hal positif terkait dengan perkembangan hukum Indonesia. Apabila melihat dari sisi praktis, bahwa teks resmi KUHP yang berlaku saat ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda.³ KUHP merupakan hukum pidana warisan kolonial Belanda atau dikenal dengan sebutan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang secara umum berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi sesuai dengan ketentuan Pasal 75 R.R jo Pasal 131 I.S.

¹ M. Muladi dan D. Sulistyani, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)* (Semarang: Universitas Semarang Press, 2020).

² A. P. Saptohutomo, *Saat RKUHP Picu Demo Besar Mahasiswa Pada 2019*, KOMPAS.com, Juni 21, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/17233991/saat-rkuhp-picu-demo-besar-mahasiswa-pada-2019>.

³ F. A. Fitrah, "Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia", *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (Februari 14, 2021): 122–137, ISSN: 2685-8606, 2685-8614, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>.

Konsekuensi demikian mengakibatkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia disesuaikan di Nederland. Sampai saat ini pun pada masa transisi adanya ketentuan mengenai KUHP yang baru, masih diberlakukan berdasarkan ketentuan tersebut.

Visi reformasi hukum pidana Indonesia, yakni untuk membangun hukum pidana nasional yang dapat menggantikan warisan kolonial melalui RUU KUHP atau yang saat ini telah disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun misi utamanya adalah dekolonialisasi berbentuk rekodifikasi terbuka yang sifatnya sistemik, tidak hanya fragmentaris atau yang dikenal dengan sebutan amandemen tambal sulam seperti kain perca (*lappe dekken*).⁴

Penyusunan konsep RUU KUHP (yang kini telah disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2023) pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/rekonstruksi/restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP (WvS) peninggalan Hindia Belanda. Dapat dikatakan bahwa hadirnya konsep RUU KUHP bertujuan untuk melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional.⁵

Istilah terbuka maksudnya adalah sikap antisipatif di kemudian hari jika terjadi perkembangan yang harus menyimpang dari asas kodifikasi. Adapun misi rekodifikasi terbuka yakni sebagai refleksi misi utama dekolonialisasi yang mengemuka sejak kemerdekaan melalui UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958. Pada tahun 1964 dibicarakan konsep yang pertama, kemudian pada tahun 1968, Konsep 1971/1972, Konsep 1977 atau dikenal dengan Konsep Basaroesdin (BAS), Rancangan KUHP 1979, Rancangan KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 1984/1985, Rancangan KUHP 1986/1987, Rancangan KUHP 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998, Rancangan KUHP 1999/2000, kemudian terbit RUU KUHP 2012. Konsep terakhir dari Rancangan KUHP tersebut adalah RUU KUHP 2015, 2016, dan 2018, dan 2019.⁶

Pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan pembaharuan pokok-pokok pikiran atau dengan kata lain pembaharuan mengenai konsep atau ide dasar.⁷ Artinya bahwa dalam pembaharuan hukum termasuk pembaharuan hukum pidana, tidak hanya pembaharuan terhadap pasal-pasal atau aturannya saja, namun mencakup pembaharuan terhadap nilai-nilai yang termuat dalam aturan-aturan tersebut.

Membahas mengenai pembaharuan pidana, maka terdapat tiga hal penting yang berkaitan dengan hukum pidana materil (KUHP) di Indonesia, yakni dari sisi politik, sosiologis, serta praktis. Apabila dilihat dari sisi politik, maka Indonesia yang telah lama memproklamkan kemerdekaannya sewajarnya sudah mempunyai KUHP nasional sendiri. Hal demikian dapat dipandang sebagai suatu simbol kebangsaan atau identitas bangsa Indonesia sendiri yang telah merdeka. Lantas mengapa kita tetap ingin mempertahankan KUHP yang berasal dari bangsa yang telah menjajah negara kita ini. Selanjutnya dari sisi sosiologis, maka pengaturan yang termuat dalam hukum pidana sudah seharusnya mencerminkan di mana aturan itu tumbuh dan berkembang atau dengan kata lain bahwa aturan tersebut seharusnya menggambarkan identitas suatu bangsa itu sendiri. Hal demikian berarti nilai-nilai sosial, budaya, dan nilai-nilai lainnya tercermin dan termuat dalam aturan tersebut. Begitupun halnya dengan ketentuan KUHP yang masih berlaku saat ini, kebutuhan-kebutuhan bangsa Indonesia belum terakomodasi di dalamnya.

Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad-hoc* (parsial) tetapi harus

⁴ Muladi dan Sulistyani, 37.

⁵ B. N. Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017).

⁶ A. Hanafi, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2009), 9.

⁷ T. Tongat dkk. "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (Mei 6, 2020): 158, ISSN: 2548-1657, 1829-7706, <https://doi.org/10.31078/jk1717>.

bersifat mendasar, menyeluruh dan sistematis dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.⁸ Dilihat dari sistem pemidanaan, ketiga masalah pokok tersebut bukanlah pilar-pilar yang berdiri sendiri, melainkan berada dalam bangunan sistem yang lebih besar. Bangunan sistem hukum pidana yang lebih besar inilah yang biasa disebut bagian umum (*general part*) atau ketentuan umum (*general rules*) yang kemudian di dalam UU No. 1 Tahun 2023 dimasukkan bangunan konsepsional sistem hukum pidana (sistem pemidanaan).⁹

Penelitian ini melengkapi berbagai penelitian terdahulu, terutama berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana nasional dan hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal ini diperlukan, mengingat kajian terdahulu masih menyoal mengenai urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana pernah dituliskan Ni Putu Yulita Damar Putri dan Sagung Putri M.E Purwani (2020), yang belum secara khusus membahas mengenai konsep yang termuat setelah disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian terkait juga pernah ditulis oleh Suparji (2016), yang membahas mengenai mewujudkan pembaharuan KUHP dengan menjabarkan prinsip-prinsip pembaharuan KUHP di dalamnya, namun belum secara konkret membahas perbandingan antara konsep KUHP (WvS) dengan KUHP yang baru.

Meskipun UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP diklaim sebagai tonggak pembaharuan hukum pidana nasional, masih terdapat celah penelitian yang signifikan. Sebagian besar kajian terdahulu lebih menekankan pada aspek kodifikasi semata, sementara analisis kritis mengenai perubahan konsep fundamental hukum pidana seperti konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana masih terbatas.

Pembahasan pada penelitian ini akan berfokus mengenai perbandingan konsep hukum pidana yang termuat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini dengan konsep hukum pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama yang berkaitan dengan 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan pidana.

Penelitian ini melengkapi berbagai penelitian terdahulu, terutama berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana nasional dan hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal ini diperlukan, mengingat kajian terdahulu masih menyoal mengenai urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana pernah dituliskan Ni Putu Yulita Damar Putri dan Sagung Putri M.E Purwani (2020),¹⁰ yang belum secara khusus membahas mengenai konsep yang termuat setelah disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian terkait juga pernah ditulis oleh Suparji (2016),¹¹ yang membahas mengenai mewujudkan pembaharuan KUHP dengan menjabarkan prinsip-prinsip pembaharuan KUHP di dalamnya, namun belum secara konkret membahas perbandingan antara konsep KUHP (WvS) dengan KUHP yang baru.

Meskipun UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP diklaim sebagai tonggak pembaharuan hukum pidana

⁸ B. Kurniawan, "Mengetahui Lebih Dekat Pasal Kontroversial Ruu Kuhp, Perspektif Teori Dan Praktik Hukum DI Indonesia", Oktober 13, 2022, https://www.academia.edu/88391529/Mengetahui_Lebih_Dekat_Pasal_Kontroversial_Ruu_Kuhp_Perspektif_Teori_Dan_Praktik_Hukum_DI_Indonesia.

⁹ Arief, 5.

¹⁰ N. P. Y. D. Putri dan S. P. M. E. Purwani, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 8 (2020): 1–13, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/61874>.

¹¹ S. Suparji, "Mewujudkan Pembaharuan KUHP", *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 1, no. 1 (Juli 17, 2021): 34–41, ISSN: 2807-1832, <https://doi.org/10.36722/jmih.v1i1.729>.

nasional, masih terdapat celah penelitian yang signifikan. Sebagian besar kajian terdahulu lebih menekankan pada aspek kodifikasi semata, sementara analisis kritis mengenai perubahan konsep fundamental hukum pidana seperti konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana masih terbatas.

Pembahasan pada penelitian ini akan berfokus mengenai perbandingan konsep hukum pidana yang termuat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini dengan konsep hukum pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama yang berkaitan dengan 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan konseptual. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan. Adapun bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

HASIL PENELITIAN

1. Konsep Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pidana dalam KUHP (WvS)

Konsep dasar pada tindak pidana di dalam KUHP (WvS) ialah bentuk perlakuan yang diberikan kepada seseorang atas dasar kejahatan dan/atau pelanggaran yang telah diperbuat. Pemberian hukuman pada tindak pidana tersebut sebagai upaya penanggulangan perbuatan yang melanggar KUHP (WvS) dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹² Tentu perbuatan yang dapat dikenakan pidana adalah bentuk pelanggaran terhadap sumber hukum tertulis sebagaimana yang dianut di dalam KUHP (WvS). Hal ini kita kenal dengan asas legalitas formal, seorang hakim hanya dapat membuat putusan sesuai dengan aturan yang tertulis pada KUHP (WvS). Maka bentuk putusan hakim sejauh yang berada di dalam sebuah kepastian hukum dengan mempertimbangkan sisi keadilan.

Disampaikan juga oleh Curzon, bahwa penggunaan hukum pidana sebenarnya bukan keharusan, jika upaya preventif yang tidak bersifat hukum pidana masih mempunyai kedudukan yang penting, bahkan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.¹³ Pada penerapannya hal tersebut hanya menjadi teori yang belum dapat dijalankan secara maksimal, terbukti di Indonesia dengan masih banyaknya ditemukan putusan hakim dengan vonis penjara bahkan hingga hukuman mati. Sejalan dengan hal tersebut menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Secara kontekstual KUHP (WvS) menjelaskan bahwa tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Moeljatno mengutip dalam bukunya Smidt.L pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah

¹² L. Hakim, "Implementasi Teori Dualistik Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)", *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (Juni 28, 2019): 1–16, ISSN: 2721-5784, 1978-8991, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>.

¹³ L. B. Curzon, *Criminal Law* (Financial Times, 1997).

¹⁴ M. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

dirasakan sebagai *Onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.¹⁵ Dalam menentukan hal tersebut pada zaman Hindia Belanda memiliki kompetensi pengadilan yang berbeda, sehingga bentuk pelanggaran dapat diperiksa oleh Pengadilan Kepolisian (*Landgerecht*), dan kejahatan diperiksa oleh *Landraad* dan *Raad Van Justitie*. Sehingga pemisahan tersebut mendukung hakim untuk dapat memberikan putusan sesuai pada sanksi yang berlandaskan keadilan dengan memerhatikan kepastian hukum. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dianggap harus dipidana sesuai dengan akibat dari perbuatan yang telah terjadi. Berorientasi pada objektivitas atau perbuatan maka akan disesuaikan dengan sanksi yang nantinya akan diberikan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban, khususnya pertanggungjawaban pidana maka seperti yang dipahami bersama bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ Bentuk pertanggungjawaban seseorang dalam konsep hukum pidana bukan hanya penjatuhan pidana atas tindakan yang telah diperbuat, melainkan dapat dikatakan guna menjaga marwah keadilan yang menjadi aspek penting dalam menjalankan sebuah hukuman.¹⁷ Melihat hal ini di dalam konsep tindak pidana KUHP jelas menganut asas legalitas, ketika ada sebuah aturan yang dilanggar maka akan dipidana, begitu pula sebaliknya. Sejauh belum ada aturan yang mengaturnya maka tindakan tersebut tidak dapat dipidana. Dalam hal ini sering diperdengarkan tentang istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang kurang lebih artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Dipidananya seseorang tidak cukup jika orang tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau bersifat melawan hukum. Walaupun perbuatannya memenuhi unsur pelanggaran terhadap undang-undang dan tidak dibenarkan, tapi hal tersebut belum tentu memenuhi syarat untuk dijatuhkannya pidana. Untuk pemidanaannya masih perlu syarat, bahwa orang yang berbuat itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Sebagai salah satu contoh bahwa melindungi diri dari kejahatan merupakan bentuk pembelaan diri dari tindak pidana. Istilah tersebut biasanya disebut dengan *noodweer*. Hal itu juga berlaku ketika *noodweer-exces*, di mana kita tahu bahwa itu berarti pembelaan darurat yang melampaui batas. Pembelaan melewati batas itu juga tidak dapat dipidanakan, selama unsur-unsurnya mendukung dan terbukti hal itu terjadi. Namun acapkali hal tersebut dianggap sebuah tindak pidana karena pembelaan diri tersebut menyebabkan orang lain (pelaku kejahatan sebenarnya) dapat terluka hingga hilang nyawa.

Konsep pertanggungjawaban pidana yang dimuat dalam KUHP (WvS) belum secara tersurat mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi. Atau dengan kata lain bahwa legalitas korporasi sebagai pelaku tindak pidana belum secara eksplisit dimuat dalam KUHP (WvS).¹⁸ Pengaturan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi justru dimuat di luar KUHP (WvS), seperti halnya ketentuan pada Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada awalnya pembentukan hukum pidana di Indonesia belum mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal demikian dikarenakan KUHP (WvS) hanya

¹⁵ Moeljatno.

¹⁶ A. Simanjuntak, J. Esther dan H. Manullang, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No: 70/Pid.Sus/2019/PN BJJN)", *Jurnal Hukum PATIK* 10, no. 1 (April 24, 2021): 15–24, ISSN: 2777-0605, <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.218>, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/218>.

¹⁷ R. Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 10.

¹⁸ W. Anjari, "Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2017): 247176, ISSN: 1907-8528, 2338-7785, <https://www.neliti.com/publications/247176/>.

menentukan orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Kemudian dipengaruhi pandangan bahwa badan hukum tidak dapat dipidana karena hanya dianggap sebagai fiksi hukum sehingga tidak mempunyai nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana seperti orang pribadi (*natuurlijke persoon*).¹⁹ Tidak diakomodirnya pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam aturan induk tersebut atau KUHP (WvS) menyebabkan kurangnya kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Apalagi kaitannya dengan era globalisasi dewasa ini, eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar baik bagi kepentingan manusia ataupun bagi kepentingan negara. Hal demikian dikarenakan korporasi tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat atau dengan kata lain, dalam rangka mencukupi kebutuhan umat manusia dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan korporasi.²⁰

Kita sadari bahwa KUHP (WvS) warisan kolonial Belanda ini hampir selalu mendasarkan pada prinsip pembalasan daripada adanya upaya perbaikan. KUHP (WvS) akan terkesan lebih kejam dan nyata dari sisi hukuman pidananya. Hal ini tentu saja tidak serta merta bisa dipandang terkesan balas dendam saja. Justru KUHP (WvS) bisa kita resapi lebih dalam dari unsur balas dendam saja. Kita sadar dengan hukuman pidana yang diwariskan masa kolonial Belanda ini bisa dijadikan sebagai langkah preventif bagi masyarakat luas. Hal ini tentu mempermudah untuk menyadarkan kepada masyarakat tentang benar dan salah. Di atas juga sudah dijelaskan bahwa KUHP warisan Belanda ini mempunyai kekuatan kepastian, sehingga hal itu menjadi kejelasan dalam sebuah peraturan. Masyarakat tidak lagi hidup dalam keraguan dan keambiguan sebuah pasal. Jadi, tidak bisa ketika KUHP (WvS) warisan kolonial Belanda hanya dipandang sebagai alat balas dendam.

KUHP (WvS) warisan kolonial Belanda dianggap lebih mengedepankan tentang pemidanaan dibandingkan dengan upaya pembenahan. Hal ini dianggap lebih efisien dalam melaksanakan upaya preventif pada masyarakat yang belum melakukan tindak pidana. Diharapkan dengan melihatnya hukuman pidana yang terjadi maka akan ada efek jera yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri maupun masyarakat luas. Secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa pidana yang terdapat pada warisan kolonial Belanda ini memberi efek jeranya lebih luas, yang artinya tidak hanya tertuju pada pelaku saja.

Pasal 10 KUHP (WvS) mengatur mengenai jenis-jenis pidana mengenai pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok di antaranya adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Untuk pidana tambahan, yakni dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Apabila dilihat bahwa KUHP (WvS) masih mempertahankan pidana mati sebagai pidana pokok di dalamnya. Permasalahan mengenai pidana mati saat ini memang masih menuai pro dan kontra di dalamnya. Untuk yang pro terhadap pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak terperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara yang sedemikian besar biayanya. Begitu pula akan hilang ketakutan-ketakutan kita kalau orang-orang demikian melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan lagi dalam masyarakat.” Sebaliknya kaum abolisionis yang menyatakan bahwa hukuman mati sebagai melestarikan suatu siklus kekerasan dan mempromosikan “sense of vengeance” (rasa dendam) dalam kultur umat manusia. Kaum

¹⁹ B. Suhariyanto, “Putusan Pidana Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif “Vicarious Liability””, *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (September 8, 2017): 17, ISSN: 2579-4868, 1978-6506, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.68>, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/68>.

²⁰ K. Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (Desember 26, 2014): 575, ISSN: 2503-1465, 0125-9687, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36>, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/36>.

abolisionis mengatakan bahwa kita tidak boleh mengajarkan bahwa kita pantas membunuh orang yang bersalah.²¹

Achmad Ali mengemukakan bahwa “hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius (heinous) mencakupi korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (*beyond reasonable doubt*) bahwa memang dialah sebagai pelakunya. Misalnya, terdakwa sendiri secara gamblang mengakui perbuatannya, seluruh alat bukti memang “menyatakan” diri terdakwa sebagai pelakunya.”²²

2. Konsep Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Spirit lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud pembaharuan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah nasional yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, seperti yang dikemukakan oleh Sudarto²³ bahwa pertama, apabila dilihat dari sisi politis, maka Indonesia yang sudah lama merdeka ini sudah sewajarnya memiliki hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila. Kedua, dilihat dari sosiologis bahwa pembentukan hukum pidana nasional ini berdasarkan nilai-nilai atau kultur masyarakat Indonesia sendiri. Ketiga, dari sisi praktis bahwa hukum pidana nasional yang berlaku harus dipahami dan dimengerti masyarakat, mengingat KUHP (WvS) yang masih berlaku saat ini masih banyak menggunakan bahasa-bahasa asing atau istilah-istilah Belanda.

Hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 ini memberikan wajah baru dalam hukum pidana nasional bangsa Indonesia saat ini. Konsep hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang ini sangat berbeda dengan konsep yang termuat dalam KUHP (WvS). Hal ini dapat dilihat dari sistematika UU No. 1 Tahun 2023, yang tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. UU No. 1 Tahun 2023 hanya terdapat 2 (dua) buku di dalamnya, Buku I tentang Aturan Umum yang di dalamnya terdiri dari 6 (enam) bab dan untuk Buku II tentang Tindak Pidana yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) bab.

Tidak hanya sistematika pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 2023 ini yang berubah, namun juga terkait dengan konsep 3 (tiga) masalah pokok di dalamnya juga berubah, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan ketentuan pidananya.

Pertama, terkait dengan tindak pidana (*criminal act*), UU No. 1 Tahun 2023 menempatkan tindak pidana berada dalam Buku II yang disatukan dengan pertanggungjawaban pidana. UU No. 1 Tahun 2023 memberikan definisi yuridis terkait dengan tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 12 ayat (1), yaitu suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana/tindakan. Definisi yuridis ini sebelumnya tidak kita temui dalam KUHP (WvS) yang berlaku saat ini. Karena selama ini pengertian mengenai tindak pidana yang kita pahami adalah pengertian yang berasal dari para ahli.

Definisi yuridis mengenai tindak pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 ini memberikan sesuatu hal yang baru, di mana adanya penekanan bahwa yang dinamakan dengan tindak pidana (*criminal act*) merupakan perbuatan yang

²¹ D. R. S. Mukantardjo, “Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no. 1 (2005): 39, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/284/171>.

²² Mukantardjo, 40.

²³ S. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), 34.

tidak hanya diancam dengan sanksi pidana, melainkan perbuatan tersebut dapat dikenai tindakan. Kemudian pada Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa untuk kemudian dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana/tindakan, maka perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Hal yang sangat menarik tentu tergambar dalam ketentuan tersebut, di mana tindak pidana tidak hanya merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, bahwa tidak hanya asas legalitas formil yang diakui dalam UU No. 1 Tahun 2023 ini, namun juga termasuk halnya legalitas materil karena berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang juga dipandang bertentangan dengan kebiasaan, norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat.

Selama ini asas legalitas yang kita kenal dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (WvS) adalah legalitas formil yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana telah ada. Pengaturan yang berbeda kemudian dimuat dalam UU No. 1 Tahun 2023 khususnya pada Pasal 2 ayat (1) bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.” Hukum yang hidup dalam masyarakat dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Jika dicermati rumusan Pasal tersebut semakin memperjelas bahwa selain hukum tertulis yang diakui dalam sistem hukum Indonesia terdapat sumber hukum lain yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa memang beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal demikian dapat juga dijumpai dalam lapangan hukum pidana yang biasanya dikenal dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.²⁵

Jika membahas mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat, maka tentu sangat lekat dengan konsep yang dikemukakan oleh Von Savigny, yaitu mengenai *volksgeist* (jiwa bangsa) bahwa hukum itu hidup dan berkembang bersama masyarakat, hukum yang demikian tidak dapat dipisahkan dengan bangsa tersebut.²⁶ Konsep hukum yang hidup dalam masyarakat kerap kali dikaitkan dengan hukum tidak tertulis dari masyarakat non-barat. Seperti yang dikemukakan oleh R. Soepomo sebagaimana dikutip oleh Yana Sahyana, yang mengontraskan antara sistem hukum kolonial dan sistem hukum bumiputra, menurut pandangannya hukum kolonial itu mencerminkan

²⁴ N. Putri, “Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas”, *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (Agustus 31, 2021): 61, ISSN: 2808-2648, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5>.

²⁵ M. N. Fadlilah, S. S. Fauziah dan A. A. D. Khoirudin, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Asas Legalitas”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (November 26, 2022): 505–514, ISSN: 2686-4819, 2686-1607, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790>.

²⁶ Y. Sahyana, “Pembangunan Hukum Pidana: Pluralisme Hukum dalam RKUHP”, *Konstituen* 2, no. 1 (Februari 2020): 47–61, <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1195/1/2342-Article%20Text-8748-2-10-20220308.pdf>.

jiwa serta semangat orang barat yang sifatnya individualis, liberal, sekuler dan abstrak. Hal demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum bumiputra yang sifatnya komunal atau kolektif, religius-magis dan konkret.²⁷

Sebagai negara hukum yang bersumber pada Pancasila maka sudah barang tentu produk hukum yang dilahirkan merupakan cita-cita nilai yang diserap dari norma kehidupan masyarakat dan budaya yang dimiliki.²⁸ Mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat pada dasarnya merupakan langkah yang dinilai cukup progresif mengingat sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda yang menyebabkan sistem hukum Indonesia (pada waktu dijajah disebut Hindia Belanda) mengikuti sistem hukum negeri Belanda dan lebih miris lagi ketika pasca kemerdekaan hukum yang berlaku khususnya hukum pidana tetap hukum negeri Belanda menggunakan asas konkordansi.²⁹

Ditegaskan bahwa adat merupakan suatu endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah adat berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut. Walaupun terdapat perbedaan sifat atau perbedaan corak antara setiap kaidah kesusilaan dan kaidah hukum, namun bentuk-bentuk perbuatan yang menurut hukum dilarang atau diharuskan itu adalah menurut kesusilaan dicela atau dianjurkan, dengan demikian pada hakikatnya hukum itu berpangkal pada kesusilaan yang diusahakan pemeliharaannya oleh kaidah-kaidah hukum.³⁰

Kedua, pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal dengan *criminal responsibility/liability* bertujuan untuk menilai apakah seseorang yang didakwakan atas suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.³¹ Konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.³² Apabila membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut *common law system*, maka sebenarnya tidaklah memiliki perbedaan yang mendasar antara *civil law system*. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali adanya sebab-sebab yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*).³³

Chairul Huda mengemukakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”.³⁴ Orang dipertanggungjawabkan pidana karena tindak pidana yang

²⁷ Sahyana, 51.

²⁸ E. Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2012): 1–18, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art1>, <https://journal.uin.ac.id/JHI/article/view/4120>.

²⁹ Y. A. Fajrin dan A. F. Triwijaya, “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia”, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 1 (Juli 24, 2019): 734–740, ISSN: 2615-4412, 1412-2715, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>.

³⁰ D. Nurcaesar dan M. R. Arafat, “Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat”, *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (September 1, 2021): 852–863, ISSN: 2579-9398, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4.852-863>.

³¹ N. Melani dan S. Agustini, “Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (Agustus 1, 2021): 736–748, ISSN: 2722-8312, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.47273>.

³² A. Simanjuntak, J. Esther dan H. Manullang, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No: 70/Pid.Sus/2019/PN BJT)”, *Jurnal Hukum PATIK* 10, no. 1 (April 24, 2021): 17, ISSN: 2777-0605, <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.218>, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/218>.

³³ S. Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 40, ISSN: 2356-1440, 2502-230X, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.

³⁴ C. Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-4

dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah karena tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Atau dengan kata lain seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁵ Di dalam hukum, tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum.³⁶

Untuk pertanggungjawaban pidana ini konsep bertolak dari asas yang sangat fundamental, yaitu *geen straf zonder schuld* atau ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Dirumuskan oleh Konsep bahwa tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan. Pengertian dari asas ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.³⁷ Jadi prinsipnya bertolak dari ‘pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan. Sehingga meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Adapun kesalahan dalam hukum pidana (*schuld in strafrechtelijke*) yang dimaksud dapat berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).³⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 bahwa “Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.” Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Suatu konsep baru yang dihadirkan dalam ketentuan tersebut bahwa pertanggungjawaban pidana disyaratkan dilakukan dengan unsur sengaja atau karena kealpaan, yang sebelumnya di dalam KUHP (WvS) yang masih berlaku saat ini tidak mengatur secara gamblang mengenai kedua unsur tersebut.

Selain mengatur secara tegas mengenai syarat pertanggungjawaban pidana, maka di dalam UU No. 1 Tahun 2023 ini juga telah mengatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti yang kita ketahui bahwa KUHP (WvS) tidak mengatur hal demikian, karena pertanggungjawaban yang termuat dalam KUHP (WvS) masih merujuk pada manusia (*natuurlijke persoon*), belum secara tegas mengatur untuk badan hukum (*rechtspersoon*) atau korporasi. Hal demikian dapat kita lihat dalam ketentuan yang termuat pada Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Yang dalam artian bahwa UU No. 1 Tahun 2023 telah memperluas ketentuan mengenai subjek hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana. Pada Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 juga memberikan definisi yuridis terkait dengan korporasi, yaitu mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 70.

³⁵ Candra, 40.

³⁶ P. Padil, “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (April 5, 2016): 44–59, ISSN: 2477-815X, <https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.280>.

³⁷ Hanafi, 120.

³⁸ M. Utoyo dan K. Afriani, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, November 26, 2020, 75, ISSN: 2621-9867, 2407-3849, <https://doi.org/10.46839/Iljih.v0i0.298>, <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298>.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan UU No. 1 Tahun 2023 juga menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana korporasi khususnya di dalam Pasal 46 menyebutkan bahwa “Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, maka dapat dikatakan sebenarnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana bukanlah merupakan persoalan yang mudah, mengingat bahwa korporasi adalah badan hukum.³⁹ Permasalahan ini tentunya berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan (*mens rea*) merujuk pada sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* merupakan unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya dapat melakukan tindakan melalui organ-organ atau pengurusnya.

Ketiga, tidak hanya konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang baru dihadirkan dalam UU No. 1 Tahun 2023, tetapi juga konsep pidanaannya. Berbicara mengenai pidanaannya, maka secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. UU No. 1 Tahun 2023 memuat konsep pidanaannya yang sangat baru, jauh berbeda dari KUHP (WvS), yakni adanya tujuan dan pedoman pidanaannya. Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dilihat dari sudut pandang sistem, posisi tujuan amatlah sentral dan fundamental karena merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pidanaannya.⁴⁰

Adapun tujuan pidanaannya dalam UU No. 1 Tahun 2023, yakni a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian ditekankan juga di dalam Pasal 52 UU No. 1 Tahun 2023 bahwa pidanaannya itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Tidak hanya tujuan pedoman pidanaannya, namun UU No. 1 Tahun 2023 juga mengatur mengenai pedoman pidanaannya yang dimuat dalam Pasal 53 UU No. 1 Tahun 2023, yakni a) dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan; b) jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Berdasarkan rumusan yang termuat dalam pasal tersebut menggambarkan hakim tidak hanya dituntut untuk menegakkan kepastian hukum saja, tetapi hakim juga seharusnya menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Suatu langkah yang progresif semakin tergambar dalam pengaturan tersebut, di mana selama ini kebanyakan hakim-hakim masih berkutat di lingkaran kepastian hukum semata.

Pertimbangan-pertimbangan dalam hal pidanaannya pun wajib diperhatikan, seperti halnya a) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c) sikap batin pelaku Tindak Pidana;

³⁹ N. Aripkah, “Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (Mei 1, 2020): 367–387, ISSN: 08548498, 2527502X, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>.

⁴⁰ Arief, 7.

d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e) cara melakukan Tindak Pidana; f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j) pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; k) dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pertimbangan mengenai pidana yang diatur juga tidak hanya diperuntukkan untuk manusia alamiah, tetapi korporasi yang juga sebagai subjek hukum dalam tindak pidana dalam hal pidanaannya pun terdapat pertimbangan-pertimbangan, seperti yang diatur dalam Pasal 56 UU No. 1 Tahun 2023 bahwa dalam pidana terhadap korporasi wajib dipertimbangkan: a) tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b) tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi; c) lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; d) frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; e) bentuk kesalahan Tindak Pidana; f) keterlibatan Pejabat; g) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; h) rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; i) pengaruh pidana terhadap Korporasi; dan/atau j) kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Tidak hanya tujuan dan pedoman pidana yang mewarnai konsep baru yang dihadirkan dalam UU No. 1 Tahun 2023, tetapi juga jenis sanksi pidana pun berbeda dari KUHP (WvS). UU No. 1 Tahun 2023 secara eksplisit mengatur mengenai sanksi pidana dan tindakan, yang artinya menganut double track system (sistem dua jalur). UU No. 1 Tahun 2023 mengatur mengenai sanksi pidana pokok, tambahan dan tindakan. Sanksi pidana pokok ialah hukuman dalam hukum pidana yang tidak dapat digabung di antara sejenisnya (kecuali diatur secara khusus dalam aturan pidana relevan) serta bersifat mandiri (dapat dijatuhkan tanpa ada sanksi pidana tambahan).⁴¹ Adapun yang dimaksud dengan sanksi pidana tambahan merupakan hukuman dalam hukum pidana yang sifatnya fakultatif (dapat diberikan atau tidak oleh hakim) serta tidak dapat berdiri sendiri dalam penjatuhannya karena sebelumnya harus diberikan sanksi pidana pokok.⁴² Tindakan ialah suatu perlakuan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana melalui vonis hakim serta berfungsi sebagai prevensi khusus.⁴³

Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus. Pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pidana pokok sebagaimana dimaksud terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun pidana tambahan menurut UU No. 1 Tahun 2023 terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Menariknya dalam Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023 bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok. Melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus

⁴¹ M. Ulfah, "Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019 : Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP", dalam *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers* (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), 247–270, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11140>.

⁴² Ulfah.

⁴³ Ulfah.

yang diancamkan secara alternatif. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).⁴⁴ Mengingat ide konsep pembaruan KUHP di Indonesia dicerminkan dalam "ide keseimbangan/monodualistik". Yang selama ini kita hanya berpatokan dengan adanya kesalahan dalam tindak pidana, atau sering disebut "tiada pidana tanpa kesalahan" (asas culpabilitas), meskipun dalam KUHP lama (WvS) hal ini juga belum diatur. Namun dalam perkembangan saat ini, asas itu tidak cukup. Saat ini hukum pidana lebih menuntut adanya keseimbangan karena melihat tujuan adanya hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁵

KESIMPULAN

Kehadiran Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi suatu langkah yang banyak membawa dampak besar bagi hukum pidana di Indonesia. Sistematika hukum pidana yang dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengalami perubahan, terkait dengan 3 (tiga) konsep masalah pokok di dalamnya juga mengalami perubahan, yaitu: Pertama tentang *Criminal Act* (tindak pidana), pengertian dari tindak pidana dimuat secara yuridis dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berkaitan sanksi tindak pidana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2). Kedua, tentang *Criminal Responsibility* (pertanggungjawaban pidana) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur secara tegas tentang syarat pertanggungjawaban pidana yaitu unsur sengaja atau karena kealpaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Ketiga, tentang pemidanaan yang menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam konsep pemidanaan ada tujuan dan pedoman pemidanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih kepada semua penulis yang turut berkontribusi dalam penulisan ini, baik dari sisi waktu dan finansial yang telah memungkinkan penulisan ini terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alin, F. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (September 28, 2017): 14. ISSN: 2580-1678, 2355-4657. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/6>.
- Anjari, W. "Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2017): 247176. ISSN: 1907-8528, 2338-7785. <https://www.neliti.com/publications/247176/>.
- Arief, B. N. *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.
- Aripkah, N. "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (Mei 1, 2020): 367–387. ISSN: 08548498, 2527502X. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>.

⁴⁴ A. Ramdan, R. H. Ramadhani dan M. Susanto, "Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan HAM", *Arena Hukum* 11, no. 3 (2018): 600–617, ISSN: 01260235, 25274406, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10>.

⁴⁵ F. Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (September 28, 2017): 14, ISSN: 2580-1678, 2355-4657, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/6>.

- Candra, S. “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”. *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 39–56. ISSN: 2356-1440, 2502-230X. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.
- Curzon, L. B. *Criminal Law*. Financial Times, 1997.
- Fadlilah, M. N., S. S. Fauziah dan A. A. D. Khoirudin. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Asas Legalitas”. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (November 26, 2022): 505–514. ISSN: 2686-4819, 2686-1607. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790>.
- Fajrin, Y. A., dan A. F. Triwijaya. “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia”. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 1 (Juli 24, 2019): 734–740. ISSN: 2615-4412, 1412-2715. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>.
- Fitrah, F. A. “Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia”. *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (Februari 14, 2021): 122–137. ISSN: 2685-8606, 2685-8614. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>.
- Hakim, L. “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”. *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (Juni 28, 2019): 1–16. ISSN: 2721-5784, 1978-8991. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>.
- Hanafi, A. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Huda, C. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Kristian, K. “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (Desember 26, 2014): 575. ISSN: 2503-1465, 0125-9687. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36>. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/36>.
- Kurniawan, B. “Mengenal Lebih Dekat Pasal Kontroversial Ruu Kuhp, Perspektif Teori Dan Praktik Hukum DI Indonesia”, Oktober 13, 2022. https://www.academia.edu/88391529/Mengenal_Lebih_Dekat_Pasal_Kontroversial_Ruu_Kuhp_Perspektif_Teori_Dan_Praktik_Hukum_DI_Indonesia.
- Melani, N., dan S. Agustini. “Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (Agustus 1, 2021): 736–748. ISSN: 2722-8312. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.47273>.
- Moeljatno, M. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mukantardjo, D. R. S. “Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no. 1 (2005): 37–52. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/284/171>.
- Muladi, M., dan D. Sulistyani. *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*. Semarang: Universitas Semarang Press, 2020.

- Murdiana, E. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2012): 1–18. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art1>. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/4120>.
- Nurchaesar, D., dan M. R. Arafat. “Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat”. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (September 1, 2021): 852–863. ISSN: 2579-9398. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4.852-863>.
- Padil, P. “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (April 5, 2016): 44–59. ISSN: 2477-815X. <https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.280>.
- Putri, N. “Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas”. *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (Agustus 31, 2021): 60–72. ISSN: 2808-2648. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5>.
- Putri, N. P. Y. D., dan S. P. M. E. Purwani. “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 8 (2020): 1–13. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/61874>.
- Ramdan, A., R. H. Ramadhani dan M. Susanto. “Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan HAM”. *Arena Hukum* 11, no. 3 (2018): 600–617. ISSN: 01260235, 25274406. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10>.
- Sahyana, Y. “Pembangunan Hukum Pidana: Pluralisme Hukum dalam RKUHP”. *Konstituen* 2, no. 1 (Februari 2020): 47–61. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1195/1/2342-Article%20Text-8748-2-10-20220308.pdf>.
- Saleh, R. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Saptohutomo, A. P. *Saat RKUHP Picu Demo Besar Mahasiswa Pada 2019*. KOMPAS.com, Juni 21, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/17233991/saat-rkuhp-picu-demo-besar-mahasiswa-pada-2019>.
- Simanjuntak, A., J. Esther dan H. Manullang. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No: 70/Pid.Sus/2019/PN BJT)”. *Jurnal Hukum PATIK* 10, no. 1 (April 24, 2021): 15–24. ISSN: 2777-0605. <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.218>. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/218>.
- Sudarto, S. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Suhariyanto, B. “Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif “Vicarious Liability””. *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (September 8, 2017): 17. ISSN: 2579-4868, 1978-6506. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.68>. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/68>.
- Suparji, S. “Mewujudkan Pembaharuan KUHP”. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 1, no. 1 (Juli 17, 2021): 34–41. ISSN: 2807-1832. <https://doi.org/10.36722/jmih.v1i1.729>.
- Tongat, T., dkk. “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (Mei 6, 2020): 157. ISSN: 2548-1657, 1829-7706. <https://doi.org/10.31078/jk1717>.

-
- Ulfah, M. “Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019 : Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP”. Dalam *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*, 247–270. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11140>.
- Utoyo, M., dan K. Afriani. “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, November 26, 2020, 75. ISSN: 2621-9867, 2407-3849. <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>. <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298>.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]